

MEDIA KALTIMTARA

JUMAT,
27 OKTOBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



ANTREAN, DOMINASI KENDARAAN DARI LUAR TANJUNG SELOR

BACA HALAMAN 2



PEMKAB TANA TIDUNG SOSIALISASIKAN MANFAAT DESA CANTIK

BACA HALAMAN 7



Antrean Panjang, Dominasi Kendaraan dari Luar Tanjung Selor

TANJUNG SELOR - Antrean menular, sekitar puluhan meter di Jalan Sabanar Lama sempat menghiasi pemandangan selama kurang lebih sehari. Rata-rata, kendaraan yang tengah antrean, mayoritas truk dan sebagian juga jenis L-300 dan pickup.

Antrean panjang terpantau mulai pada Selasa 24 Oktober, sore hari hingga Rabu 25 Oktober 2023, namun sekitar pukul 12.00 wita antrean panjang tersebut dapat terurai.

Pengawas SPBU Sabanar Lama, Angga saat dikonfirmasi menjelaskan, antrean panjang kendaraan roda empat tersebut mayoritas ekspedisi dan truk dari luar Tanjung Selor. Seperti dari Samarinda, Balikpapan Kaltim.

"Kadang-kadang kalau hari Minggu sudah ada di Tanjung Selor. Kadang mereka antrean solar di hari

Minggu, siklusnya seperti itu, karena kita rata-rata jualan pagi," tuturnya.

Kendaraan yang datang luar itu, seperti ekspedisi, dump truck. Kalau semacam dump truck itu biasanya angkut material jadi usai mengisi kendaraan mereka langsung berpindah tempat. "Kalau ada BBM jenis Solar mereka banyak yang antrean. Dan pengisian tetap kita batasi hanya sekali masuk," tuturnya.

Hal itu, juga berdasarkan pada aturan yang baru. Setiap kendaraan yang masuk plat kendaraan tercatat. Pengisian BBM jenis solar untuk kendaraan roda 6 maksimal itu 200 liter per satu hari. Sedangkan, untuk kendaraan jenis lainnya itu bervariasi sesuai dengan kapasitas.

Antrean panjang, terpantau juga di SPBU Jalan Sengkawit. Kendaraan

roda empat berjejer pada sisi kiri dan kanan Jalan Poros. Dominasi kendaraan yang mengantre hendak mengisi BBM jenis Solar.

Sementara itu, manager SPBU Jalan Sengkawit Jemy kala dikonfirmasi menjelaskan antrean panjang di sekitar Jalan Sengkawit tidak berlangsung lama. Dia memastikan, setelah kendaraan roda empat mengisi BBM langsung meninggalkan tempat antrean, dan pelayanan setiap kendaraan yang mengisi BBM tetap dibatasi.

"Iya, kalau antrean sudah bberkurang. Selain itu, untuk pengisian juga kita batasi sesuai ketentuan yang berlaku," singkatnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Bupati Bulungan, Syarwani saat mengikuti panen perdana cabai beberapa waktu lalu.

Pengembangan Lamban, Produksi Rendah

TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten Bulungan, memastikan pengembangan food estate di Tanjung Selor tidak diakomodir dalam program strategis nasional.

Hal itu, dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bulungan, Iwan Sugianta.

“Saat ini, food estate sudah tidak ada. Sebab, nomenklturnya sudah berubah menjadi kawasan ketahanan pangan,” ujar Iwan Sugianta, kepada wartawan, Kamis (26/10/2023).

Dia melanjutkan, secara regulasi, food estate sudah tidak bisa digunakan di Kabupaten Bulungan. Karena food estate tidak masuk program strategis nasional. Pasalnya, saat ini hanya ada lima daerah di Indonesia yang menjalankan program food estate.

Meskipun nomenklatur berubah, Pemda Bulungan memastikan tetap melakukan pengembangan kawasan ketahanan pangan, ditengah hasil produksi yang terbilang masih kurang. Kenapa nomenklturnya berubah, karena perkembangannya di wilayah Bulungan dari sisi produksi terbilang rendah.

Saat ini, kata dia, rerata produksi pertanian di Bulungan masih 4 ton per hektare (ha). “Artinya, masih jauh dari apa yang diharapkan,” imbuhnya.

Dengan capaian tersebut, Bulungan belum bisa memenuhi kebutuhan pangan di KIH1 maupun IKN di Kaltim.

Di Bulungan, sambungnya banyak komoditi pertanian yang bisa dikembangkan optimalkan. Dan itu, perlu kreativitas untuk mengolahnya se-

hingga bernilai ekonomis.

“Termasuk jika mindsetnya belum bisa diubah, maka keterpenuhan di sektor pangan akan lebih susah terpenuhi,” tuturnya.

Atas dasar itulah, sehingga belum terakomodir dalam program nasional hingga terganggunya dari sisi penganggaran dalam hal pengembangan kawasan pangan di Bulungan.

“Dana tersebut sepenuhnya di supporting dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.

Karena itu, Pemda Bulungan memastikan pengembangan tetap dilakukan. Pemerintah minta dinas terkait di Kabupaten Bulungan untuk mengintensifkan kegiatan pengembangan pangan tersebut. (tin/and)

Editor: Andhika



ADE/MKR

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Tarakan, Kamal.

Disdik Tarakan Targetkan 2024 Bahasa Tidung Masuk dalam Kurikulum Muatan Lokal

TARAKAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan berencana akan memasukan bahasa Tidung dalam kurikulum muatan lokal. Disdik menargetkan bahasa Tidung diterapkan dalam kurikulum muatan lokal pada 2024 mendatang.

“Saat ini masih penyusunan draft buku bahasa Tidung. Saat itu sudah bisa difinalkan dan buku sudah jadi. Tahap awal sosialisasi dan menyesuaikan kurikulum yang ada terutama muatan lokal. Disdik berharap secepatnya dapat diterapkan di tahun ajaran berikutnya di 2024. Itu harapan kita,” ucap Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Tarakan, Kamal, di Tarakan (26/10/2023).

Kamal mengatakan, dalam proses menyusun buku melibatkan berbagai pihak yang tentunya memiliki kemampuan bahasa Tidung. Mulai dari anak daerah, tokoh masyarakat Tidung serta narasumber luar yang

memiliki pengalaman penyusunan buku. “Kalau di Paud, kami hadirkan Profesor Jayen karena punya pengalaman menyelamatkan bahasa Konjo di Sulawesi Selatan,”katanya.

Di Tarakan, kata dia, penerapan bahasa Tidung sudah dilakukan pada 2022 lalu di sekolah Paud. Dengan mengenalkan beberapa benda menggunakan bahasa Tidung.

Menurutnya, penerapan bahasa Tidung dilakukan sebagai upaya menyelamatkan bahasa daerah. Perencanaan ini sebenarnya sudah dimulai pada 2019 lalu, namun sempat terhenti karena beberapa hal. Namun yang pasti, Kamal tidak ingin bahasa Tidung lambat laun akan tergerus oleh kemajuan zaman.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka muncullah rencana bahasa Tidung asli akan dimuatkan dalam kurikulum di satuan pendidikan. Menurutnya, cara paling efektif

untuk mengenalkan bahasa daerah, salah satunya melalui sekolah.

Dia berharap upaya menyelamatkan bahasa Tidung ini diperlukan kerjasama seluruh pihak. Mulai dari tokoh adat, anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat umum. “Tidak lain tidak bukan harapan kita masyarakat Tarakan paham bahasa daerah. Kalaupun tidak bisa mengeluarkan dengan fasih minimal dia mengerti,”harapnya.

Sehingga ke depan, lanjut dia, bahasa Tidung tidak punah termakan zaman. Kemudian, dia berharap ada kesenian daerah di Tadakan menggunakan bahasa asli lokal. “Apakah itu lagu ataupun stand up comedy bahasa Tidung. Sesuai arahan Pak Wali coba terapkan dulu di sekolah,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia
Editor: Andhika



Wali Kota Tarakan, Khairul.

ADE/MKR

Khairul Sebut Kualitas jadi Penyebab Anjloknya Harga Rumput Laut di Tarakan

TARAKAN - Anjloknya harga rumput laut di Kota Tarakan dikeluhkan sebagai besar para petani rumput laut. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul menyebut anjloknya harga disebabkan karena kualitas rumput laut di Tarakan kurang bagus.

"Karena kualitas pengolahannya mungkin yang agak kurang, kadar airnya masih cukup tinggi. Jadi jangan sampai mau cepat-cepat dapat duit akhirnya kualitas rumput lautnya kurang bagus,"ucap Khairul di Tarakan, Kamis (25/10/2023).

Dia mengatakan karena kualitas yang kurang bagus itu mengakibatkan harga rumput laut di pasaran lebih murah. Untuk itu, Khairul mengatakan persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah bersama para petani untuk meningkatkan kualitas rumput laut. "Sebenarnya kalau dalam teori pasar inikan ada rupa ada harga selalu begitu,"paparnya.

"Itu salah satu, tapi apakah hanya

itu, kita juga belum tahu. Karena baru dapat informasi kemaren jadi perlu dikaji lagi,"sambungannya.

Khairul tak menampik berdasarkan informasi yang dia diterima, harga rumput laut di Tarakan lebih murah dibandingkan wilayah lain seperti Nunukan. Oleh karena itu, permasalahan ini menurutnya, menjadi tugas pemerintahan melalui penyuluh perikanan untuk segera mengatasi persoalan anjloknya harga rumput laut.

Saat disinggung terkait keluhan petani yang menyebut penyebab anjloknya harga rumput laut karena tengkulak, Khairul menyebut hal itu merupakan persoalan non teknis. Pemerintah saat ini sedang berupaya mengatasi persoalan tersebut."Tapi harus ada keinginan dari para petani rumput laut. Karena mohon maaf nih jangan sampai dia sudah terlanjut pinjam di tengkulak mau nda mau dia terpaksa harus terikat. Kalau ada masalah dalam berinvestasi kita akan

diskusikan dengan Perbangk dengan melihat kelayakan usaha,"pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersatu Bersama Rakyat Pesisir (Beraksi) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Tarakan, Senin (23/10/2023) pagi. Mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan harga rumput laut di Kota Tarakan.

Adapun tiga tuntutan dalam aksi demonstrasi. Yang pertama, meminta pemerintahan terkait untuk merealisasikan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Kedua, mendesak pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai stabilitas harga rumput laut. Dan yang ketiga, meminta Gubernur Kalimantan Utara dan Wali Kota Tarakan menandatangani surat perjanjian masa aksi. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

Ilustrasi Gerhana Bulan Sebagian

Puncak Gerhana Bulan Sebagian di Kaltara Diprediksi terjadi 29 Oktober

TARAKAN - Puncak Fenomena Gerhana Bulan Sebagian diprediksi terjadi di Kalimantan Utara (Kaltara) pada Minggu (29/10/2023). Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Tarakan, M Sulam Khilmi di Tarakan, Rabu (25/10/2023).

Untuk diketahui, Gerhana Bulan Sebagian merupakan fenomena yang terjadi karena posisi Bulan Bumi dan matahari sejajar sempurna. Sehingga, sebagian piringan Bulan masuk ke umbra Bumi. Alhasil saat puncak gerhana terjadi, Bulan akan terlihat berwarna gelap sedikit kemerahan di bagian yang terkena umbra Bumi tersebut.

Kendati demikian, kata Khilmi, tidak semua wilayah bisa menikmati fenomena ini. Indonesia khususnya Kaltara termasuk wilayah beruntung yang dapat melihat langsung fenomena tersebut secara langsung.

Dijelaskannya, berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat Gerhana Bulan Sebagian akan berlangsung dalam 5 fase yaitu, Awal Fase Penumbra (P1), Awal Fase Sebagian (U1), Puncak Gerhana (Puncak), Akhir Fase Sebagian (U4), Akhir Fase Penumbra (P4).

“Berikut merupakan jadwal terjadinya Gerhana Bulan Sebagian: P1 akan dimulai pada 18.00 Waktu Universal, 01.00 Wib, 02.00 Wita, 03.00 Wit. U1 akan berlangsung pukul 19.34 Waktu Universal, 02.34 Wib, 03.34 Wita, 04.34 Wit. Puncak dimulai dari jam 20.14 Waktu Universal, 03.14 Wib, 04.14 Wita, 05.14 WIT. U4 pada pukul 20.53 Waktu Universal, 03.53 Wib, 04.53 Wita, 05.53 WIT. P4 akan dimulai pukul 22.28 Waktu Universal, 05.28 WIB, 06.28 Wita, 07.28 Wit,” ucap Khilmi saat membacakan release BMKG.

Berdasarkan waktu tersebut, lanjut dia, sejumlah daerah di Indonesia dapat menyaksikan fenomena tersebut. P1, U1 dan puncak dapat disaksikan di seluruh wilayah di Indonesia, kemudian U4 dapat diamani di seluruh wilayah di Indonesia kecuali Papua bagian Timur dan terakhir P4 hanya bisa dilihat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, sebagai Kalimantan Barat.

Terkait hal tersebut, Kepala BMKG

Tarakan, M Sulam Khilmi mengungkapkan fenomena tersebut dapat disaksikan di tempat terbuka dan masyarakat bisa menyiapkan alat bantu seperti teleskop dan kamera dan alat bantu lainnya.

“Kalau di Tarakan paling bagus lihatnya di Taman Berlabuh atau di bangunan tinggi,” paparnya.

Disinggung mengenai apakah BMKG akan melakukan pemantauan, dia mengatakan pihaknya tidak melakukan pemantauan karena keterbatasan personil BMKG. Terlebih, beberapa personil harus melakukan pemeliharaan alat yang ada di Kaltara. Dengan personil yang kurang pihaknya pun harus membagi waktu untuk melakukan pemeliharaan tersebut sehingga tidak dapat melakukan hal tersebut.

“Sekarang dua orang harus ke Sebatik, Nunukan dalam rangka pemeliharaan alat dan alat-alat kami bertebaran di seluruh Kaltara dan kami kan juga kerjanya 24 jam,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia
Editor: Andhika



Sosialisasi Soal pentingnya Desa Statistik di Kabupaten Tana Tidung, oleh Bupati Ibrahim Ali.

Pemkab Tana Tidung Sosialisasikan Manfaat Desa Cantik

TANA TIDUNG - Bupati KTT Ibrahim Ali, berikan arahan pada kegiatan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), yang berlangsung di Pendo-p Djaparuddin, Kamis (26/10/2023).

Dalam arahnya, Ibrahim Ali menjelaskan program Desa Cantik merupakan bagian daripada pembangunan yang mesti harus mulai dari desa, sebagai satuan pemerintahan paling bawah. Diharapkan, melalui pembangunan pemerintah yang mulai dari Desa diharapkan pembangunan tetap searah dengan kearifan lokal.

"Semoga dengan adanya program desa cantik, semakin membawa dampak yang besar dalam terwujud-

nya Upun Taka yang bermartabat, sejahtera, indah dan humanis," jelas Ibrahim.

Masih di kesempatan yang sama, Ibrahim Ali berpesan kepada warga penerima manfaat, dari pelaksanaan program desa cantik dapat menjalankan program tersebut dengan maksimal sehingga hasilnya dapat lebih efektif. "Program KPM, lokusnya kita mulai dari Desa Mendupo, Kecamatan Beta-yau," ungkap Ibrahim.

Kemudian Desa Mendupo, dijadikan role model bagi desa lain di Kabupaten Tana Tidung. Sosialisasi itu dimaksudkan, juga sebagai bentuk desa pembinaan statistik. Program

Desa Cantik mempunyai konsep untuk melaksanakan peningkatan literasi statistik pada perangkat atau komunitas desa.

Kemudian, bisa mendekatkan konsep kegiatan statistik kepada praktisi di level desa. Sehingga, kemudian mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengetahui cara mendapatkan data-data di tingkat Desa.

Selanjutnya, dapat menetapkan tujuan penyelenggaraan statistik di level desa, "Sehingga mampu mengimplementasikan kaidah statistik dengan benar di tingkat Desa," tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika





PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik

KALIMANTAN TIMUR TERIMA 7 SERTIFIKAT PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

BACA HALAMAN 2-3



**PERSIAPAN KUNKER
PRESIDEN JOKOWI DI KUBAR,
KAPOLDA KALTIM TINJAU
SEJUMLAH TITIK
BACA HALAMAN 29**



FOTO : NICHIA / MEDIA KALTIM

Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud), Kemendikbudristek, Hilmar Farid bersama seluruh perwakilan provinsi usai penyerahan sertifikat di Kawasan Wisata Kota Tua, Halaman Museum Fatahillah, Jakarta.

Kaltim Terima 7 Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Takbenda

JAKARTA - Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Budaya Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan 213 Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan 19 Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Menariknya, dalam kesempatan ini provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima sebanyak 7 sertifikat pen-

etapan Warisan Budaya Takbenda. Antara lain, sertifikat untuk budaya Mecaq Udat, Besoyong, Betore, Jamit Burai, Banaq Sawaq Pelulukng Peruku, Kuda Gepang Kutai Kartanegara dan Jatung Utang Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kemendikbudristek, Hilmar Farid menyampaikan bahwa penetapan ini tidak boleh berhenti hanya sampai penyerahan sertifikat saja.

Namun yang penting adalah tindak lanjut atau rencana aksi ke depan sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya memajukan kebudayaan bangsa yang dapat memberi manfaat untuk masyarakat luas.

"Warisan Budaya yang telah ditetapkan harus dilestarikan melalui kegiatan-kegiatan nyata seperti festival, seminar, sarasehan, workshop atau bahkan dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang mem-

bangkitkan semangat pelestarian," ujarnya di Kawasan Wisata Kota Tua, Halaman Museum Fatahillah, Jakarta, Rabu (25/10) malam.

Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2023 mengambil tema "Melindungi Budaya, Melindungi Bumi", kata Hilmar, merupakan kristalisasi dari upaya perlindungan ekosistem kebudayaan secara menyeluruh. Melalui tema ini, perlindungan kebudayaan di Indonesia diharapkan tidak hanya mengarah pada Warisan Budayanya saja tetapi juga menyentuh kesatuan lingkungan alam pendukungnya.

"Saya ucapkan selamat kepada Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati/Wali kota, Lembaga, Pemilik, Pengelola, dan tidak lupa juga kepada para budayawan serta pihak-pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya demi majunya budaya bangsa Indonesia," tutur Hilmar.

Kepada Tim Ahli dan semua pihak yang terlibat dalam Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan

Cagar Budaya Peringkat Nasional yang telah bekerja sejak awal hingga puncak Apresiasi Warisan Budaya Indonesia ini, Hilmar menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi, bantuan, dan kerja samanya.

"Untuk masyarakat, saya berpesan untuk senantiasa menjaga budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Semoga warisan budaya Indonesia akan tetap lestari sepanjang masa sebagai tanggung jawab kepada anak cucu kita," tutupnya.

Masih di tempat yang sama, Direktur Pelindungan Kebudayaan, Kemendikbudristek, Judi Wahjudin, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil jerih payah dan kerja keras semua pihak antara lain para Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kebudayaan, Lembaga, Para Maestro, Pemilik dan Pengelola Cagar Budaya, pelaku ser-

ta masyarakat terkait.

"Acara yang dilaksanakan pada malam ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, pelaku dan komunitas budaya, serta pemilik dan pengelola Cagar Budaya yang turut mendukung Penetapan Warisan Budaya sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa," pungkasnya.

Diketahui, selain penyerahan apresiasi kepada perwakilan daerah dan para pemangku kepentingan, acara malam apresiasi juga disemarakkan dengan berbagai pertunjukan, pameran, dan stand/booth kuliner tradisional yang disediakan bagi pengunjung. Penampilan seni pertunjukan dan aneka kuliner dari berbagai daerah turut ambil bagian dari apresiasi Warisan Budaya Indonesia tahun 2023.

Pewarta : Nicha Ratnasari



TOYOTA | LET'S GO BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



Kode Promo
BTSOLI

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*





THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!





AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Kadisbun Kaltim: Usaha Perkebunan Harus Simetris dengan Prinsip Ekologi dan Kultural

SAMARINDA - Dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara teknis dan strategi perencanaan amat diperlukan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir dalam acara yang diprakarsai oleh GAPKI yang bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (24/10/2023).

Pembangunan usaha perkebunan, tambah Muzakkir, selain untuk memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, juga harus memerhatikan perlindungan lingkungan.

"Perlindungan yang dimaksud yaitu dengan menjaga dan mengelola Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT), yang merupakan lahan memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural," paparnya.

"Alasannya, berbagai nilai ini amat penting, baik di tingkat tapak, daerah, nasional atau global sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021," tambah Muzakkir.

Dia juga bilang bahwa industri perkebunan kelapa sawit dinilai penting terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Oleh sebab itu Pemprov Kaltim berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di sektor tersebut.

"Ini dikarenakan sektor kelapa sawit identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja di semua tingkatan pendidikan," ujarnya.

Tak hanya itu, Muzakkir juga me-

negaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menyerap biaya cukup besar sehingga perlu upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Menurut Muzakkir, salah satu cara mengukur efisiensi tenaga kerja adalah dengan menghitung produktivitas kerja, di mana produktivitas kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi dalam satuan waktu tertentu.

"Dan saat ini tenaga kerja perkebunan di Kalimantan Timur mencapai 319 ribu pada Perkebunan Besar Sawit (PBS), belum termasuk pekerja perkebunan rakyat yang ada," jelasnya.

Muzakkir membeberkan, kebutuhan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh luas kebun, jenis pekerjaan, topografi dan iklim, teknologi, komposisi/umur tanaman.

"Untuk itu pengelolaan tenaga kerja harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengontrolan tenaga kerja penting untuk dilakukan dalam menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik," kata Muzakkir.

Lebih jauh Muzakkir menambahkan, pekerjaan dalam pemeliharaan cukup banyak memerlukan biaya dan tenaga, dan merupakan syarat untuk mendapatkan tanaman yang baik. Selain itu, kata dia, kegiatan perkebunan kelapa sawit berfluktuasi sepanjang tahun, karena adanya pekerjaan yang berkaitan dengan musim, lahan, curah hujan, dan bulan panen puncak dan panen rendah.

"Oleh karenanya perlu peningkatan kapasitas tenaga kerja perkebunan agar menghasilkan tenaga kerja yang cermat, efektif dan efisien. Dibatalkan bahwa tenaga kerja itu adalah perangkat lunak yang harus selalu dilakukan upgrade, agar pengelolaannya dapat memenuhi kaidah-kaidah yang telah dipersyaratkan," pungkasnya. (ADV)

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir



Dinas Perkebunan Fasilitas Peningkatan SDM Penilai Usaha Perkebunan di Kaltim

BOGOR - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pembangunan perkebunan dalam meningkatkan iklim investasi melalui pengelolaan yang baik.

Salah satunya adalah memfasilitasi Petugas Penilai Usaha Perkebunan atau PUP untuk meningkatkan kapasitas melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) di wilayah Bogor, Jawa Barat, pada 23-28 Oktober 2023, yang saat ini masih dalam pelaksanaan.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ahmad Muzakir, mengatakan bahwa di Kaltim saat ini tercatat 303 Perusahaan Perkebunan Besar sebagai sumber devisa negara dari hasil ekspor komoditas sawit/CPO dan sumber bahan baku industri pangan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat untuk menambah pendapatan.

"Amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa aspek pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya," papar Muzakir.

"PUP merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang telah diubah dua kali dengan Permentan Nomor 29 tahun 2016 dan Permentan Nomor 21 tahun 2017," tambahnya.

Muzakir mengemukakan, penilaian usaha perkebunan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan perkebunan sesuai dengan



kewenangannya, memerlukan petugas penilai yang memiliki kapasitas mumpuni dan standar, agar mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan.

"Tahun 2023, Pemprov Kaltim melalui Dinas Perkebunan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) menyelenggarakan pelatihan PUP untuk peserta yang dibiayai APBD sumber dana FCPF dengan jumlah peserta 25 orang dari seluruh kabupaten di Kaltim," ungkapnya.

Tujuan penilaian, kata dia, adalah untuk mengetahui kinerja yang dicapai oleh perusahaan, antara lain aspek teknis, manajemen usaha, dan kepatuhan.

"Pelaksanaan Penilaian usaha perkebunan dilakukan paling kurang 1 tahun sekali untuk perusahaan yang sedang dalam tahap pembangunan baik kebun dan/atau unit pengolahan, dan paling kurang 3 tahun sekali untuk perusahaan yang sudah

operasional," terangnya.

Ahmad Muzakir lebih lanjut menyatakan bahwa kelompok penilaian hasil dari penilaian usaha perkebunan terdiri dari kelas kebun yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan kinerja usaha perkebunan.

Bagi Perusahaan perkebunan tahap operasional yang memperoleh kelas kebun I (baik sekali), II (baik) atau III (cukup) dapat mengajukan proses sertifikasi ISPO sebagaimana persyaratan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Harapannya agar setelah kembali melaksanakan pendidikan dan pelatihan, para peserta melaksanakan tugas-tugas demi mewujudkan tata kelola perkebunan berkelanjutan di Kaltim dapat kita wujudkan semagaimana tujuan yang telah digariskan dalam Perda Kaltim No 7 tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan," pungkasnya. (ADV)



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dr. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.K.J, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Angka Kematian Ibu dan Bayi, Kota Samarinda Tertinggi di Kaltim

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan angka kematian ibu dan anak menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data per Oktober 2023, jumlah kematian ibu sebanyak 46 orang dan bayi 302 orang.

"Angka kematian ibu dan bayi di Kaltim masih tinggi, meski sudah ada upaya peningkatan pelayanan kesehatan," jelas Kepala Dinkes Kaltim Dr. Jaya Mualimin, Kamis (26/10/2023).

Jaya menambahkan sebaran kema-

tian ibu di Kaltim tahun 2023 sampai bulan Oktober, terdiri dari Samarinda sebanyak 10 orang, Kutai Timur 8 orang, Kutai Kartanegara 7 orang, Paser sebanyak 5 orang, Berau 4 orang, Kutai Barat 4 orang, Penajam 4 orang, dan Balikpapan 4 orang.

Diketahui, dugaan kematian ibu dikarenakan beberapa faktor, antara lain pendarahan 9,2 persen, eklamsia 10,2 persen, infeksi 3,7 persen, jantung 2,4 persen, gangguan darah 2,4 persen, tuberkulosis 1,2 persen, gangguan

metabolisme 2,4 persen, serta ada beberapa belum diketahui penyebabnya.

Sedangkan untuk kematian bayi di Kaltim total sebanyak 302 orang, terdiri dari Samarinda 68 bayi, Kutai Kartanegara 67 bayi, Balikpapan 56 bayi, Kutai Timur 42 bayi, Berau 34 bayi, Bontang 23 bayi, Paser 19 bayi, Kutai Barat 15 bayi, PPU 7 bayi, dan Mahakam Ulu 3 bayi. **(ADV/nta)**

Pewarta : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*

Di Kaltim Belum Ada Laporan Penyakit Monkeypox

SAMARINDA- Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dr. Jaya Mualimin bersyukur pasalnya hingga saat ini penyakit cacar monyet (monkeypox) belum ditemukan di Kaltim. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengatakan terkait kasus positif cacar monyet pertama ditemukan di Jakarta pada Agustus 2022 lalu.

Pada 13 Oktober 2023 kasus bertambah satu, 19 Oktober 2023 bertambah lagi satu kasus, dan 21 Oktober 2023 bertambah 5 kasus dan 23 Oktober 2023 bertambah 2 kasus positif cacar monyet.

Sementara itu, 11 orang yang menjadi suspek monkeypox telah menjalani pemeriksaan di laboratorium PCR. Kementerian Kesehatan juga menegaskan vaksin cacar monyet akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia.

Untuk saat ini, vaksin diberikan kepada kelompok prioritas yang memiliki risiko tinggi, yaitu pelaku hubungan sesama jenis. "Alhamdulillah, belum ada kasus cacar monyet atau Monkeypox di Kaltim. Sampai sekarang, Kaltim menjadi wilayah yang



Kepala Dinkes Kaltim Dr. Jaya Mualimin

bebas dari ancaman cacar monyet," kata Kepala Dinkes Kaltim dr. Jaya Mualimin, Kamis (26/10/2023).

Kendati demikian, dr. Jaya tetap meminta kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap penyebaran penyakit cacar monyet.

"Meski belum ada di Kaltim, kita ter-

us waspada dengan penyakit menular ini. Jika ada gejala-gejala tersebut, masyarakat diminta dengan cepat mengunjungi faskes terdekat," tutup dr. Jaya. **(ADV/nta)**

Pewarta : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Seluruh peserta Pesoda 1 Kaltim tahun 2023.

DispORA Kukar Resmi Buka Pesoda 1 Kaltim 2023

TENGGARONG - Pekan Special Olympic Daerah (Pesoda) 1 Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2023 di Kutai Kartanegara (Kukar), resmi dibuka. Pembukaan digelar di Halaman Kantor Bupati Kukar, pada Kamis (26/10/2023). Pembukaan diawali dengan defile peserta dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim.

Dilanjutkan beberapa penampilan musik dari penyandang disabilitas dan tarian pembuka dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenggarong. Serta eksibisi pertandingan Cabang Olahraga (Cabor) Bocce, antara sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (DispORA) Kukar dan salah satu atlet yang menjadi bagian kontingen.

Sekretaris DispORA Kukar, Safliansyah, pun mengapresiasi terselenggaranya Pesoda 1 Kaltim 2023, dengan Kukar sebagai tuan rumah. Ia

pun berharap, event ini akan menjadi event tahunan yang kembali digelar pada tahun-tahun berikutnya.

"Kami senang melihat anak-anak kita yang hadir, tidak hanya berbicara olahraganya saja, tapi juga kesetaraan, inklusi sosial, dan ternyata mereka punya semangat yang besar," ungkap Safliansyah.

Tak hanya itu, Pesoda 1 ini pun sebagai langkah pemerintah untuk mewadahi para anak-anak spesial ini untuk berprestasi. Ini pun menjadi wadah bagi para pengurus SOna seluruh kabuydan kota di Kaltim untuk terus bersilaturahmi. Memastikan event ini bisa terus berlanjut di tahun berikutnya.

"Agar anak-anak kita bisa ada tempat untuk berprestasi," tutup Safliansyah.

Diketahui, Pesoda 1 Kaltim tahun

2023 digelar selama 4 hari, sejak 24-27 Oktober. Diikuti 200 atlet dengan kebutuhan khusus. Total sebanyak 7 cabor yang dipertandingkan, diantaranya atletik, renang, bocce, boccia, bulutangkis, sepakbola dan tarian daerah.

Dipertandingkan di 5 venue yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yakni di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang untuk cabor atletik, bocce dan boccia. Cabor sepakbola di Lapangan Mini Soccer DispORA Kukar, Cabor Bulutangkis di Lapangan Bulutangkis DPRD Kukar, Cabor Renang di Kolam Renang Junjung Buyah dan Lobi Utama DispORA Kukar untuk cabang Tarian Daerah. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Terus Mantapkan Persiapan, Pemkab Kukar Gelar Rapat Finalisasi Kukar Bersholawat Jilid 2

TENGGARONG - Jelang pelaksanaan Kukar Bersholawat Jilid 2, yang menghadirkan Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf, persiapan matang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Acara yang digelar pada Sabtu (28/10/2023) ini akan dilaksanakan di Taman Kota Raja Tenggarong.

Rapat finalisasi pun dilaksanakan pada Kamis (26/10/2023) di Ruang Rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar. Dengan mengundang sejumlah pihak terkait. Diantaranya Polres Kukar, Satpol PP Kukar, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ormas Banser, Ormas Pemuda Pancasila.

"Rapat finalisasi, jadi melibatkan

lintas sektoral yang ada di rapat tersebut," ungkap Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza.

Dendy melanjutkan, akan ada beberapa penutupan dan rekayasa lalu lintas saat acara dilaksanakan, yakni dengan menutup sejumlah ruas jalan. Mulai dari sepanjang Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau (depan Sekretariat KPU Kukar hingga Sekretariat DPRD Kukar), Jalan Aji Masnadai di Timbau.

Jalan akan ditutup tersebut, akan digunakan untuk parkir kendaraan tamu VIP dan jemaah Kukar Bersholawat Jilid 2. Sementara jalan di sekitar Taman Kota Raja Tenggarong digunakan untuk tempat duduk para jemaah yang

menyaksikan Kukar Bersholawat Jilid 2.

"Untuk Jembatan Penyebrangan Orang di Taman Kota Raja itu nantinya aksesnya akan ditutup, supaya tidak ada jemaah yang menyaksikan sholawat dari jembatan. Ditakutkan akan terjadi sesuatu dan lain hal," lanjut Dendy.

Sejauh ini dijelaskan Dendy tidak ada kendala apapun. Persiapan panggung dan alat-alat akan dilakukan sejak Jumat (27/10/2023) sore hingga Sabtu (28/10/2023) pagi. Ia pun memastikan Kukar Bersholawat Jilid 2 akan lebih meriah lagi, dibanding Kukar Bersholawat Jilid 1 yang digelar pada September lalu. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Basiswa Kukar Idaman Berlanjut, 24 Santri Tahun Ini akan Menimba Ilmu di PTIQ dan IIQ

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), kembali menindaklanjuti perjanjian kerjasama Basiswa Kukar Idaman untuk santri lanjut Perguruan Tinggi (PT), dengan Institut Ilmu Quran (IIQ) dan Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ) di Jakarta.

Kegiatan berupa addendum perjanjian kerjasama ini, sekaligus dirangkai dengan silaturahmi bersama 44 santri asal Kukar yang menimba ilmu di dua lembaga tersebut. Diantaranya 33 santri yang berkuliah di PTIQ dan 11 santri di IIQ.

Dijelaskan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, pada tahun ini akan ada 24 santri lagi yang akan melanjutkan kuliah di dua lembaga besar tersebut, dari target 20 santri.

"Jadi sekarang ini strategi kami tidak terikat dengan target, selama ada anak Kukar yang punya potensi dan kemauan untuk menuntut ilmu kami akomodir," jelas Dendy.

Nantinya, santri-santri yang sudah lulus menempuh pendidikannya, maka mereka akan mengabdikan di Kukar. Setidaknya selama 5 tahun pasca lulus, untuk mensyariatkannya di Kukar. Misalnya Tahfiz Quran akan mengabdikan mengajar agama. Bagi yang lulusan Fakultas Agama Islam (FAI) maka akan jadi guru atau dosen. Sementara untuk lulusan jurusan Hukum Syariah atau Ekonomi Syariah, bisa mengabdikan di perbankan syariah, Baznas dan MUI.

Karena memang kebijakan pimpinan daerah saat ini, dikatakan Dendy, tidak hanya fokus dalam pendanaan dan pembiayaan melalui mekanisme basiswa saja.



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Kabag Kesra Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza

Namun juga lulusan dari dua lembaga perguruan tinggi itu bisa memberikan dampak besar, bagi masyarakat saat kembali ke Kukar. Bahkan Pemkab Kukar mulai diakhir tahun 2023 ini, akan memetakan lulusan-lulusan ini akan ditempatkan dimana saja

"Alhamdulillah yang bersamai kami tadi Bankaltim tara, kami langsung melakukan pembukaan rekening untuk penerima basiswa. Dan Alhamdulillah Bankaltim tara ada perbankan syariah, mereka pun welcome terhadap lulusan PTIQ dan IIQ," tutup Dendy. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat berada di Desa tengin Baru, Kamis (26/10/2023).

Makmur Tinjau Langsung Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi Desa Tengin Baru

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengapresiasi berjalan lancarnya penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi 2023 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kamis (26/10/2023). Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kegiatan ini langsung dipantau Pj Bupati PPU Makmur Marbun.

Program kerja Pembentukan Percontohan Desa Anti Korupsi ini telah berjalan sejak 2021 lalu. Pada 2023 ini, dilaksanakan di 22 desa se-Kaltim, termasuk Desa Tengin Baru yang ada di PPU.

Pada kegiatan ini, Tim KPK hadir sebagai tim penilaian Desa Anti Korupsi ini. Bersama dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta tim Penilai dari Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen PDTT).

"Atas nama Pemkab PPU, Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penilai yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi PPU, terutama dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih dari tindak pidana korupsi," jelasnya.

Menurutnya, mewujudkan masyarakat yang sejahtera di suatu daerah, diperlukan langkah-langkah dan prioritas utama dalam berbagai program. Salah satu aspek dalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah pemberantasan korupsi.

Perlu diketahui, bahwasannya dalam UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Aturan ini menunjukkan

bahwa, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.

Hal ini dikarenakan korupsi dapat berakibat secara signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Maka itu, Makmur mendukung adanya kegiatan ini.

Karena dengan adanya kegiatan penilaian ini, menjadi bekal tercipta sinergitas dalam penyelenggaraan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Utamanya bagi kepala desa, aparatur desa, anggota BPD, pengurus BUMDes dan juga masyarakat.

"Besarnya harapan Kami dengan dilaksanakannya kegiatan ini, pengelolaan dana desa bisa semakin lebih transparan, akuntabel dan bebas dari tindak pidana korupsi, keberhasilan dan kesuksesan pembangunan desa merupakan ujung tombak bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten PPU," pungkas Makmur. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kepala Diskes PPU, Jansje Grace Makirusat dalam kegiatan penyerahan makanan bergizi tambahan ke penderita stunting di Desa Labangka, Kamis (26/10/2023).

Diskes PPU Fokus Penanganan Sejak Dini dan Pencegahan Stunting

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus berfokus pada penanganan dan pencegahan kasus stunting di daerah. Melalui Dinas Kesehatan (Diskes) PPU, berfokus pada penanganan sejak dini dan pencegahan.

Kepala Diskes PPU, Jansje Grace Makirusat mengatakan dalam persoalan stunting ini pihaknya berfokus langsung melihat ke penyebabnya. Pertama adalah menasar kepada remaja putri salah satunya dengan pemberian tablet tambah darah.

"Jadi Kami ada kegiatan di sekolah, namanya aksi bergizi yang kegiatannya meliputi olahraga, sarapan dan minum obat tambah darah secara bersama-sama dalam seminggu sekali selama 90 hari kepada

remaja putri," kata dia di sela-sela penyerahan bantuan makanan bergizi tambahan di Desa Labangka, Kamis (26/10/2023).

Selain itu, pihaknya juga memiliki program pada calon pengantin. Selain edukasi reproduksi pihaknya juga telah memberikan masukan terkait ketika sang ibu sedang hamil.

"Terkait apa yang harus dilakukan dan sebagainya," sebutnya.

Selanjutnya bagi ibu hamil dan kurang gizi juga diintervensi dengan diberikan makanan tambahan. Dilanjutkan ketika kelahiran bayi dilakukan pengukuran dan penimbangan bayi dan jika ditemukan ciri-ciri stunting maka diberikan penanganannya.

"Jadi intervensi kami itu sejak remaja putri sampai bayi lahir hingga

balita," jelas Grace.

Menurutnya, angka stunting di PPU saat ini sesungguhnya tidak tinggi. Hanya saja, memang belum dapat diketahui seutuhnya.

Karena hingga saat ini belum banyak bayi yang diukur dan baru dikisaran 60-70 persen yang telah melalui pengukuran. Setidaknya jika 90 persen bisa diukur, diperkirakan bisa mendapat gambaran stunting yang sebenarnya.

"Harapannya kepada keluarga untuk lebih memperhatikan gizi balita di keluarga masing-masing. Bahwa memberikan gizi sejak balita akan memberikan generasi yang baik bagi anak di masa mendatang," tutup Grace. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Tim penilai dalam kegiatan penilaian percontohan Desa Anti Korupsi di Desa Tengin Baru, Kamis (26/10/2023).

Penilaian Desa Anti Korupsi, Desa Tengin Baru Peroleh Predikat Istimewa

PPU - Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) usai menjalani penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi 2023, Kamis (26/10/2023). Dalam program yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, Desa Tengin Baru memperoleh skor cukup baik, yakni 96,5.

Desa Tengin baru merupakan perwakilan dari 22 desa se-Kaltim. Pada kegiatan tersebut Pj Bupati PPU Marmur Marbun pada kegiatan ini hadir untuk langsung memberikan semangat dan dorongan pada Pemdes Tengin Baru agar dapat meraih hasil maksimal.

Ia menyampaikan bahwa Desa Tengin Baru patut berbangga. Karena telah berhasil menjadi salah satu desa di PPU dan dipercaya menjadi pilot project sebagai Desa Anti

Korupsi.

"Desa Tengin baru ini merupakan desa yang penuh inovasi dan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tinggal itu semua bersinergi," katanya.

Koordinator Tim KPK RI, Nur Cahyadi menyampaikan apresiasinya kepada tim penilai yang hadir untuk mendukung penilaian percontohan desa anti korupsi. Kemudian juga pada Pemkab PPU yang telah memberikan dukungan dalam persiapan penyelenggaraan program ini.

"Ucapan terima kasih kepada Pj Bupati yang sudah menugaskan jajarannya kurang lebih tiga bulan. Serta kepala desa dan aparat desa yang sudah melengkapi lima komponen dan 18 indikator untuk penilaian," ungkapnya.

Disampaikan pula bahwa ada lima

indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan Desa Anti Korupsi. Yakni penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Lebih lanjut, atas penilaian tersebut Desa Tengin Baru, berhasil meraih skor nilai sebesar 96,5 dengan predikat istimewa. Hasil ini merupakan hasil rekapan dari seluruh tahapan penilaian yang dilakukan.

"Kelima indikator ini terbagi dalam 18 sub-indikator yang bentuk penilaiannya presentasi yang dilanjutkan tanya jawab, pengecekan dokumen fisik. Yang kemudian melakukan visit ke lokasi yang di pilih langsung, setelah itu nilainya diakumulasi bersama seluruh penilai," pungkas Nur. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyerahkan bantuan makanan bergizi tambahan di Desa Labangka, Kamis (26/10/2023).

Pemkab PPU Salurkan Bantuan Makanan Bergizi Tambahan ke Penderita Stunting

PPU - Penanganan stunting sudah menjadi prioritas nasional yang juga wajib menjadi konsentrasi pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyalurkan bantuan makanan bergizi.

Penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun. Ia menyebutkan tujuan dari kegiatan ini salah satunya ialah untuk menekan angka stunting di Benuo Taka.

“Salah satu upaya untuk menekan stunting, maka diperlukan langkah konkret yang harus dilakukan sejak dini. Ketika pasangan akan menikah,

ibu mengandung hingga melahirkan. Tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi,” jelasnya, Kamis (26/10/2023).

Penyerahan bantuan gizi dan makanan tambahan pada sejumlah anak penderita stunting kali ini dilakukan di Desa Labangka, Kecamatan Babulu. Untuk diketahui, faktor-faktor yang menjadi penyebab stunting bersumber dari persoalan nutrisi sebesar 30 persen.

Kemudian persoalan sanitasi sebesar 40 persen, faktor pola asuh orang tua sebesar 20 persen. Serta faktor yang lain adalah faktor keturunan sebesar 10 persen.

“Saya berharap yang utama bukan hanya mengobati dan memberikan asupan makanan bergizi. Tetapi bagaimana caranya kita mampu mencegah terjadinya stunting ini sejak dini,” jelas Makmur.

Oleh karena itu, lanjutnya, pelayanan masyarakat terkait penyuluhan stunting ini wajib dilaksanakan. Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa di masing-masing posyandu yang ada.

“Sehingga Kita harapkan tidak ada lagi istilah masyarakat tidak terlayani terkait stunting ini,” pungkasnya. (ADV/SBK)



DPKD Kaltim Selamatkan Arsip Covid-19 Sebagai Catatan Sejarah

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim akan melakukan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 Kaltim selama pandemi dari kurun waktu 2020 hingga 2023

Arsiparis Ahli Muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Risnawati SE MM mengatakan, Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 menindaklanjuti Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

"Karena ini arahan presiden langsung, dan dituangkan dari edaran menteri PANRB. Jadi kami akan mengakuisisi arsip-arsip soal penanganan COVID-19 yang ada di seluruh Kaltim, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dan tahun ini kita sudah datang pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kaltim terkait hal ini," ungkapnya.

Tujuan Penyelamatan Arsip COVID-19 ini penting karena berkaitan dengan pengelolaan arsip khususnya, Penyelamatan Arsip COVID-19 pada semua pencipta arsip yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dia menambahkan, pandemi merupakan peristiwa sangat langka, oleh sebab itu dua tahun kedepan, Pemerintah Pusat mengamankan kepada Pemprov Kaltim untuk mampu menghimpun arsip tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Sangat sayang kalau tidak didokumentasikan dengan baik, kita

meninggalkan catatan sejarah bukan semata-mata dokumentasi saja tapi untuk menjadi pembelajaran baik bagaimana bangsa dan Kalimantan Timur mampu mengantarkan warganya selesai pandemi COVID-19. Ini akan menjadi cerita ke depannya," ungkap Risnawati.

Risnawati mengkilas balik cerita mengenai pengalaman masyarakat dunia dalam menghadapi COVID-19. Di mana seluruh manusia diwajibkan menggunakan masker ketika di luar rumah, sekolah diliburkan dan belajar secara daring, para pekerja banyak yang menjalankan sistem rolling dan kerja dari rumah atau Work From home (WFH) dan masyarakat dilarang berkumpul atau membuat kerumunan.

"Inikan sejarah bukan hanya di Kaltim, tapi juga dunia ya, bahkan saya pun alumni Covid ini, bagaimana saya harus dipisahkan dari kelu-

arga. Tentu ini suatu yang berharga untuk kita arsipkan," jelasnya.

Bukan hanya soal nilai sejarahnya, penyelamatan arsip COVID-19 ini juga sebagai pertanggung jawaban pemerintah selama penanganan COVID-19. "Secara akuntabel, pemerintah juga wajib melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran COVID-19 kala itu," tutupnya.

Arsip COVID-19 yang akan diselamatkan adalah dimulai dari arsip tahun 2020 hingga arsip tahun 2023, dan penyelamatan arsip ini paling lambat harus selesai tahun 2026 mendatang.

"Tahun 2024-2025 kita target selesai untuk tingkat provinsi dan untuk tingkat kabupaten ditahun 2026," tutupnya. (ADV/Han/DPKD)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Depo tempat penyimpanan Arsip DPKD Kaltim.

Setiap OPD Diminta Siapkan Petugas Pengelola Arsip

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini masih kekurangan Arsiparis dalam mengelola arsip di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Pemprov Kaltim. Hal ini dikatakan oleh Arsiparis Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim, Risnawati kepada Mediakaltim.com pada Kamis (26/10/2023).

"SDM Arsiparis memang tidak menyeluruh OPD memiliki, saat ini cuma BKD dan BPKAD yang baru punya Arsiparis terbanyak adalah di DPKD," ungkapnya.

Seharusnya setiap OPD memiliki Arsiparis dalam mengelola kearsipan agar memudahkan dalam membuat rekap arsip yang ada di OPD tersebut. "OPD itu penting harus punya Arsiparis, seperti Arsiparis terampil dan Arsiparis ahli, jadi minimal 2 orang Arsiparis setiap OPD," tegas Rusminawati

Jika tidak memiliki Arsiparis, setiap OPD disarankan untuk memiliki petugas unit pengelola arsip, agar tidak terjadi penumpukan arsip. Ke depannya akan memudahkan pihak OPD itu sendiri jika mencari berkas.

"Kalau pun tidak memiliki arsiparis, pihak OPD harus punya petugas unit pengolah arsip, yang ada di bidang-bidang kantor tersebut, petugas ini tidak harus Arsiparis tapi dia bertugas untuk mengarsipkan setiap berkas," jelasnya.

"Untuk bisa menjadi Arsiparis saat ini sesuai peraturan minimal harus lulusan D3 kearsipan, jadi lulusan



Arsiparis Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim, Risnawati SE MM

diluar kearsipan harus mengikuti pelatihan kearsipan," ungkapnya.

Arsip seharusnya itu dikelola di setiap OPD. Yang tugasnya, mengelola surat masuk surat keluar, harus diberkas dengan rapi dan dibuat rekap dan daftar arsipnya. Hal ini akan memudahkan pihak OPD dalam pencarian berkas arsip jika diperlukan Kembali.

"Saya berharap sih arsip itu terkelola di pencipta arsip, karena jika tidak ada melakukan kelola arsip, tidak melakukan penilaian arsip, maka kami pun bisa tidak punya arsip statis. Maka diharapkan pihak OPD terkait melakukan pengadaan tenaga kearsipan, tentunya harus berkompeten bidang kearsipan. Ter-

kadang mereka (OPD) itu kesulitan dalam memberkaskan dan membuat daftar arsipnya," pungkasnya.

Diketahui, Definisi Arsiparis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. (ADV/Han/DPKD)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarballkpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982

Ini Dia Cara Mudah Membuat NIB bagi Pelaku Usaha !

BONTANG - Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat menjadi keuntungan untuk para pemilik usaha, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengontrol pelaku usaha untuk memiliki NIB.

Kepengurusannya dinilai tidak sulit. NIB juga dibagi menjadi dua yakni NIB perorangan dan NIB badan usaha. NIB perorangan cukup membutuhkan KTP orang tersebut serta email atau nomor WhatsApp yang aktif.

"Sekitar 15 sampai 20 menit su-

dah bisa terbit asal berkas lengkap," jelas Fidia, Customer service DPMPTSP saat didatangi redaksi Kamis (26/10/23).

Sementara itu, untuk NIB badan usaha bisa menyiapkan KTP, NPWP direktur dan perusahaan, e-mail, SK Kementerian dan akta dari notaris. "Badan usaha itu seperti CV, PT, yang seperti itu, pengurusan di kami bisa langsung jadi juga asal berkas lengkap pasti hari itu juga langsung jadi," ujarnya.

Untuk kepengurusan bisa langsung dilakukan mandiri secara online atau

ke pelayanan DPMPTSP jika ada hal yang kurang dimengerti. Untuk online tentu menggunakan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

"Tanpa ke PTSP juga sudah bisa terbit, karena rata-rata yang datang langsung ke sini biasanya dia belum menguasai OSS-RBA itu, nanti kami akan arahkan," tutupnya. (adv)

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari



Reklame Caleg Resmi Dibuka 25 November 2023

BONTANG - Pemasangan reklame resmi dibuka untuk para Partai Politik (Parpol) pada tanggal 25 November 2023 mendatang. Namun, sejak 2 bulan lalu sudah mulai banyak yang parpol yang mendaftar.

Fidia, Customer Service Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak bisa memastikan sudah berapa banyak yang mengajukan berkas untuk pemasangan reklame.

Walaupun pemasangan resmi masih November mendatang, banyak parpol yang sudah memasang reklame. Hal tersebut sah-sah saja, namun reklamanya diberi batasan

hanya 10 hari pemasangan.

Adapun persyaratannya harus ada rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Untuk pemberkasan dilakukan di DPMPTSP kemudian dilanjutkan ke Kesbangpol untuk dilakukan pengecekan apakah boleh terbit atau tidak.

Syarat penerbitan reklame membutuhkan KTP Caleg atau penanggung jawab, NPWP, lokasi pemasangan reklame di mana saja, foto reklame dan surat kesediaan membayar pajak.

"Untuk biaya pemasangan itu ada, cuma pembayarannya di Bapenda, pembayaran bisa berbeda-beda tergantung banyak dan lama pema-

sangan," katanya.

Sebelum 25 November 2023, pemasangan di batasi hanya 10 hari. Jika masih ada yang terpasang lebih dari itu maka akan dicabut oleh Satpol PP.

"Kalau sudah tanggal 25 November, mereka bisa pasang lebih lama, sampai nanti hari pemilu juga bisa, tapi rata-rata mereka ambil jangka pemasangan sedikit-sedikit, tapi tetap akan diperpanjang," Tutupnya. (Sya/adv)

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Jangan Ada Toleransi Terhadap Pelaku Pelecahan

TANJUNG REDEB - Adanya dugaan pelecahan di lingkungan pemerintah disorot tajam Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dia mengaku sudah mendengar kabar tersebut belum lama ini.

Dirinya menegaskan, jangan sampai ada toleransi yang diberikan terhadap pelaku pelecahan tersebut. "Pimpinannya harus tindak tegas, jangan sampai hal seperti ini dibiarkan karena akan merusak citra ASN dan instansi itu sendiri," ungkapnya.

Madri menduga tindakan pelecahan tersebut tak hanya satu kali

dilakukan pelaku terhadap bawahannya. Dirinya pun mengaku sangat geram, karena tidak ada sanksi berarti yang diberikan kepada pelaku.

"Kabarnya korban sudah melapor langsung kepada kepala OPD, tapi respons yang didapatkan tidak memuaskan dan tidak ada solusi. Padahal pimpinan OPD adalah orang yang paling bertanggungjawab jika ada kejadian-kejadian seperti ini khususnya di lingkungan instansinya," katanya.

Meski demikian, Madri tetap mengimbau kepada seluruh ASN

yang mengalami hal serupa untuk tidak takut melaporkan jika ada kejadian tidak menyenangkan, terkhusus jika ada dugaan tindak pelecahan yang berujung membuat suasana bekerja menjadi tertekan serta tidak nyaman.

"Harus berani melaporkan dan untuk kepala OPD juga harus bisa mengambil tindakan tegas bagi para pelaku pelecahan di lingkungan kerja, jangan sampai hal seperti ini dianggap biasa. Jadi harus ada sanksi yang benar-benar membuat jera para pelaku," pungkasnya. (adv/dez)



Reses Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi

Drainase dan LPJU jadi Prioritas Ichsan

TANJUNG REDEB - Belum lama ini Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi melaksanakan reses di Gang Nyiur Gading, Jalan Durian III, Kecamatan Tanjung Redeb.

Dalam reses tersebut, Ichsan mengemukakan aspirasi yang disampaikan masyarakat masih mengenai minimnya drainase dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). "Drainase itu dikeluhkan karena saat hujan deras sering terjadi genangan, selain itu mengenai LPJU karena ada beberapa

pa kawasan yang masih minim pengerangan," jelasnya.

Dirinya menambahkan, masalah drainase dan LPJU menjadi prioritas dalam agenda tugasnya sebagai anggota DPRD Berau. Ichsan pun berkomitmen untuk mengupayakan pembenahan serta peningkatan infrastruktur drainase. "Aspirasi ini akan kami sampaikan ke instansi terkait. Supaya bisa jadi prioritas," ujarnya.

Khusus untuk lampu LPJU, lanjutnya, sejauh ini dirinya telah menga-

komodir ratusan titik lampu jalan di wilayah Tanjung Redeb.

Dipaparkannya, ada sebanyak 430 titik sudah terpasang di beberapa tempat. Ditambah, pada tahun ini telah terealisasi sebanyak 120 titik yang telah terpasang.

"Jadi total pemasangan tiang lampu PJU sampai saat ini sekitar 550 titik. Ini akan terus kami upayakan, supaya wilayah yang masih butuh penerangan jalan dapat terakomodir," tandasnya. (adv/dez)

Harap Pemerintah Melegalkan Manusia Perahu yang Telah Menetap Lama di Berau



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah

TANJUNG REDEB - Adanya manusia perahu yang telah menetap lama di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan diharapkan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah dilegalkan.

Ia menuturkan, manusia perahu yang sudah menetap lama sudah ada yang menjalin hubungan pernikahan, bahkan menetap bersama masyarakat lokal.

"Sehingga harus ada kejelasan mengenai status kewarganegaraannya. Mereka juga butuh perhatian sosial dari kita," ungkapnya.

Menurutnya, ketidakjelasan status manusia perahu itu akan berdampak terhadap nasib anak-anak mereka ke depannya. "Kita harus perlakukan mereka secara manusiawi," tegasnya.

Kendati demikian, politikus Golkar ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melegalkan manusia perahu yang telah lama berbaur dengan masyarakat, tentunya diiringi dengan mencegah masukan kembali manusia perahu ke Bumi Batiwakkal.

"Saya berharap ada pendataan yang dilakukan, agar bisa diketahui berapa jumlah mereka dan dicarikan solusi yang baik dan manusiawi untuk mereka," tandasnya. (adv/dez)

Cegah Kasus Bullying, Perlu Keterlibatan Seluruh Pihak

TANJUNG REDEB - Masih maraknya kasus bullying atau perundungan yang terjadi mendapat perhatian serius oleh Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

Ia menilai, agar kasus tersebut dapat dicegah, perlu melibatkan semua pihak. "Harus jadi perhatian serius, karena berdampak buruk terhadap korban," ungkapnya.

Dirinya menyebut, tak sedikit korban yang berujung pada kematian akibat perundungan. Bagi pelaku juga bisa berakibat buruk, mulai dari gangguan mental, merusak karakter dan kecerdasan.

"Lembaga pendidikan harus menjadi lingkungan yang bebas dari perilaku ini, karena bullying bukan hanya tanggung jawab guru saja melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat," terangnya.

Upaya konkret untuk pencegahan perundungan, sebutnya, adalah pendidikan karakter yang dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak.

Pun begitu dengan guru di lingkungan sekolah, harus bisa menjadi orang tua kedua yang membimbing anak. Bila tidak, maka perilaku perundungan akan menjadi watak hingga dewasa dan merugikan lingkungan sekitar.

"Dengan perbaikan akhlak siswa dan kesadaran kolektif, diharapkan kasus bullying dapat diminimalisir dan akhirnya dihapuskan dari lingkungan pendidikan," tutupnya. (adv/dez)



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang

Dorong Pemerintah Tingkatkan SDM Bidanh Kesehatan dan Pendidikan yang Ada di Perkampungan



Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diharapkan serius meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dan pendidikan yang ada di setiap kampung.

Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari menuturkan, tenaga kesehatan dan pendidikan yang ada di wilayah perkampungan Bumi Batiwakkal harus diberi pelatihan.

"Supaya peningkatan SDM di kedua bidang tersebut dapat terealisasi, apalagi hal itu juga merupakan program kepala daerah kita," ungkapnya.

Menurutnya, peningkatan SDM tersebut akan bermuara kepada pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Terlebih sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam kemajuan suatu daerah.

Sri Kumalasari berharap, peningkatan di sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan ini bisa terus menjadi perhatian Pemkab Berau. Kata dia, peningkatan juga harus dilakukan merata di seluruh wilayah.

"Kita mengharapkan Pemkab Berau bisa lebih memberikan perhatiannya, khususnya bagi kampung yang memang membutuhkan," tandasnya. (adv/dez)



M. Adam Soroti Sulit dan Mahalnya Transportasi, Wisatawan Enggan Melancong ke Berau

BERAU-Legislator Fraksi PKB-Hanura, M Adam Sinte menyoal harga tiket pesawat ke Berau yang mahal. Dampaknya, wisatawan harus berpikir dua kali untuk mengunjungi Berau yang tersohor dengan keindahan pantai dan lautnya.

Ia mengambil perbandingan harga tiket pesawat ke Bali yang lebih murah ketimbang ke Berau. Praktis, pelancong khususnya dari dalam negeri lebih memilih Bali sebagai destinasi wisatanya.

"Kalau dilihat wisatawan yang datang ke Bali lebih banyak dari pada ke Berau, karena biaya yang mahal sampai ke sini. Kalau ke Bali, hanya dengan biaya Rp 2 juta sudah sampai, tapi ke sini biayanya lebih banyak, sampai Rp 5 juta lebih," bebarnya.

Sama halnya bila melalui jalur darat ke Berau, infrastruktur jalan menuju Berau tidak dalam kondisi mantap. Termasuk fasilitas, sarana dan prasarana penjung disana yang kurang memadai. Bila tidak ada pembenahan, ia khawatir jumlah wisatawan menuju beberapa destinasi wisata yang ada di Berau terus menurun.

"Belum lagi biaya transportasi mahal dan sebagainya, ini akan berpengaruh pada jumlah kedatangan wisatawan ke tempat tersebut," tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini lebih lanjut mengatakan, Pemprov Kaltim harus hadir mengatasi persoalan tersebut. Mulai dari perbaikan kondisi jalan, akses dan fasilitas penunjang lainnya. Musabab potensi pariwisata yang dimiliki Berau sangat besar untuk memberikan kontribusi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kaltim.

"Kalau jalan-jalan sudah mulus, walaupun wisatawan yang datang harus lewat darat, tapi mereka bisa menikmati perjalanan dengan menyenangkan. Yang paling penting adalah kita siapkan rest area untuk beristirahat, itu harus jadi perhatian utama. Jadi mereka bisa singgah di sana, tempatnya juga harus bersih dan nyaman, karena kita sepakat bahwa Kaltim memiliki destinasi wisata andalan bisa di jual," jelasnya.

Ia menerangkan, bahwa rusaknya sejumlah ruas jalan menuju Berau disebabkan aktivitas kendaraan tambang batu bara dan kelapa sawit. Padahal, sudah ada payung hukum yang jelas mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus. Sehingga ia meminta ada tindak tegas dari Pemprov Kaltim dan penegakan hukum.

"Tapi memang banyak kendala kita. Saya dapat informasi, jalan-jalan kita, jalan negara, jalan provinsi masih dikuasai truk-truk pengangkut CPO dan batubara, padahal Perda kita sudah mengharuskan mereka membuat jalan khusus, kecuali crossing jalan tapi itu harus ada izin juga. Ini harus dibenahi," pungkasnya. (eky/adv/dprdkaltim)



Anggota DPRD Kaltim, M Adam Sinte

Legislator PKS Ini Dorong Partisipasi Perempuan Meningkatkan pada Pemilu 2024



Anggota DPRD Provinsi Kaltim Fitri Maysaroh

SAMARINDA - Anggota DPRD Provinsi Kaltim Fitri Maysaroh mendorong partisipasi perempuan meningkat di lembaga legislatif. Pasalnya, kehadiran perempuan dianggapnya sangat penting di berbagai aspek. Sehingga menurutnya, penting untuk mengadvokasi agar perempuan hadir di berbagai aspek baik hukum, sosial, ekonomi dan politik. "Perempuan penentu bangsa ini, kita harus memastikan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek," ujarnya beberapa waktu lalu.

Khususnya, pada kontestasi Pemilu 2024. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar perempuan aktif dalam kontestasi politik tahun depan. "Pemilu 2024 perempuan harus mengambil peran untuk menentukan kehidupan bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tak hanya mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Namun, keterlibatan "Srikandi" di kontestasi politik juga harus dibarengi kemampuan, dan kapabilitas yang mumpuni. Sehingga tak hanya menjadi pemanis semata atau sekedar memenuhi kuota partisipasi perempuan sebesar 30 persen. "Harus punya kemampuan politik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (Eky/ Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Polda Kaltim di Bawah Komando Baru, Jahidin Harap Keamanan Kaltim Meningkatkan



Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin

SAMARINDA - Jahidin selaku Anggota Komisi I DPRD Kaltim, memberikan dukungan kepada Irjen Pol Nanang Avianto yang baru saja didapuk sebagai Kapolda Kaltim.

Jahidin meyakini, di bawah komando Nanang Avianto, raihan yang telah diraih sebelumnya dapat dipertahankan. Dan kinerja Polda untuk pengamanan dan penegakan hukum di wilayah Kaltim semakin meningkat.

"Harapannya semua personil ikut mendukung arahan Kapolda, yang lebih diharapkan adalah peningkatan kinerja daripada kepolisian itu sendiri," ucap Jahidin kepada media ini, Kamis (26/10/2023).

Peran kepolisian di Kaltim, ujar Jahidin sangat penting untuk menjaga kondusivitas dan keamanan. Terlebih, dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kaltim. Proses pembangunan hingga pemindahan Ibu Kota kelak butuh keamanan yang tinggi.

"Apalagi IKN mau dijadikan tempat upacara Presiden pada 17 Agustus 2024. Kapolda harus memastikan wilayah tersebut aman dan tertib," bebernya.

Selain itu terang Politisi PKB ini, pihak kepolisian punya tugas penting dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Termasuk memberikan informasi dalam kaitannya dengan kerawanan-kerawanan yang dipandang mengganggu ketentraman masyarakat di Kaltim. Peran ini ucapnya, akan menjadi tugas Satgas Humas pengamanan Pemilu yang baru saja dibentuk.

"Hal ini agar tidak ada isu-isu yang menyesatkan atau hoaks yang bisa merusak situasi Kamtibmas di Kaltim," pungkasnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ingatkan Kewajiban Reklamasi Sebelum Alih Fungsi Lahan

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun ingatkan pengusaha pertambangan batu bara untuk memenuhi kewajibannya yakni reklamasi pasca tambang sebelum dilakukan alih fungsi lahan.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, fenomena yang terjadi di Bumi Etam banyak perusahaan yang enggan melakukan reklamasi. Malahan lubang yang dibiarkan menganga dijadikan tempat wisata.

Padahal menurutnya pengusaha batu bara semestinya mengembalikan dulu fungsi lahan tersebut sebagaimana mestinya. Barulah lahan tersebut dimanfaatkan untuk sektor lain seperti pertanian, peternakan maupun pariwisata.

"Dikembalikan dulu seperti semula, hal itu jadi tanggung jawab perusahaan. Mungkin karena harus bayar bermilyar-milyaran makanya berpikir lepas tangan," tegasnya



(25/10/2023).

Sebenarnya menurut Samsun, lahan pasca tambang bisa saja langsung dimanfaatkan, misal digunakan untuk sektor pertanian. Namun butuh upaya keras untuk mengelolanya dan juga biaya yang besar. Musabab ada lubang-lubang tambang di area tersebut yang tentunya harus ditutup oleh para petani.

"Harus menyehatkan tanah itu, dan

juga memerlukan biaya yang besar dalam pengelolaannya. Sedangkan petani tak bisa melakukan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Itu jadi tanggung jawab perusahaan bukan para petani, 'kan ada itu jamrek," pungkasnya. (eky/adv/dprd-kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Optimalkan Kawasan Investasi di Kaltim, Sapto Dorong Pemprov Tawarkan Kemudahan Investor

SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono berharap pemerintah daerah mengawal optimalisasi investasi potensial di Kaltim. Ia mendorong promosi dan kompensasi yang menarik, agar bisa menggaet para investor.

Sapto berharap Pemprov Kaltim gencar mempromosikan kawasan industri dan ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur, Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Penajam Paser Utara dan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan. Musabab kawasan - kawasan belum maksimal menarik investor menanamkan modalnya.

"Kawasan ini kan sudah dicanangkan. Tinggal bagaimana menggaet mereka (investor) mau masuk ke kita, kasih apa, fasilitasnya bagaimana?," jelasnya, Kemarin, Selasa (24/10/2023).

Promosi yang ditawarkan sebut Sapto bisa dilakukan berbagai cara.

Salah satunya menurutnya, Pemprov dapat menawarkan kemudahan-kemudahan dalam investasi.

"Dengan kemudahan apa? Kompensasi apa, diskon apa yang diberikan. Korelasinya dengan pajak juga. Anggap saja selalu berinvestasi 1-2 tahun, dikasih kompensasi. Tahun ketiga baru dikasih pajaknya. Tinggal skemanya bagaimana," terangnya.

Lebih lanjut politisi ini menerangkan, optimalisasi yang dimaksud termasuk penggunaan alat, kendaraan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah proyek investasi. Agar tak hanya aspek investasi yang menjadi keuntungan yang diperoleh Kaltim.

"Misalnya, ada pihak yang mau berinvestasi di Kaltim. Ya kendaraan dan alat berat yang dipakai harus berplat KT, harus dari Kaltim," tutupnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono



Gelar Reses di Dua Lokasi, Ketua DPRD Kukar. Masyarakat Butuh Peluang Kerja yang Luas

TENGGARONG - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, pada semester kedua tahun 2023, telah menggelar sebanyak 2 kali reses. Dimana masuk dalam agenda Masa Sidang I tahun 2023, Kegiatan Reses Tahap III, belum lama ini.

Yakni menggelar reses bersama masyarakat Kelurahan Loa Tebu dan warga Jalan Bougenville, Kelurahan Sukarame. Untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi, mendengar-

kan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Selanjutnya akan menggelar reses di Kelurahan Melayu," ungkap Rasid, Kamis (26/10/2023).

Dari dua reses yang dilakukannya, memang masyarakat masih membutuhkan adanya pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Untuk menunjang kebutuhan masyarakat tentunya. Namun Rasid mengatakan hal lain yang disampaikan oleh mas-

asyarakat, yang berhubungan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dengan kata lain, dengan banyaknya pembangunan-pembangunan di Kukar. Setidaknya bisa berdampak luas, dengan terbukanya peluang pekerjaan. "Oleh karena itu, pembangunan di Kukar itu setidaknya harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," tutupnya. (adv)



Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, saat menggelar reses di Kelurahan Loa Tebu.



ISTIMEWA

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid saat mendampingi Kapolres Kukar, AKBP Hari Rosena.

Ketua DPRD Kukar Ikut Hadiri Penyerahan Baksos yang Digelar AKABRI

TENGGARONG - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menghadiri kegiatan bakti sosial (baksos) yang dilakukan oleh Polres Kukar. Difokuskan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Munawaroh, Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong. Pada Kamis (26/10/2023) sekitar pukul 10.15 WITA.

Baksos sendiri diantaranya bantuan sosial sembako, bantuan sosial pendidikan dan bantuan sosial bedah rumah oleh Akabri Lulusan Tahun 1990 dengan tema "Gelar 90, 33 Tahun Mengabdikan untuk Negeri". Menjadi bentuk nyata komitmen Polri kepada masyarakat. Ditandai dengan penyerahan secara simbolis

kunci bedah rumah, penyerahan paket sembako dan paket pendidikan. "Tentu ini sangat baik, bentuk kepedulian dari Polri untuk masyarakat," ujar Abdul Rasid.

Ia pun berharap, kegiatan serupa tidak berhenti disini saja. Namun bisa terus berlanjut ditempat-tempat lainnya. Dan juga diikuti oleh instansi lainnya. Tidak hanya Polri, TNI, pemerintah kabupaten. Diperlukan uluran dari dunia usaha.

"Harapannya tidak hanya Polres Kukar, tapi instansi yang lain juga," tutupnya.

Adapun yang diserahkan berupa 500 paket baksos paket sembako. Dibagikan pada warga Loa Ipuh se-

banyak 85 paket, warga Bukit Biru sebanyak 85 paket, warga Kelurahan Jahab sebanyak 85 paket, warga Kelurahan Timbau sebanyak 85 paket dan untuk Ponpes Al Munawaroh sebanyak 160 paket.

Untuk baksos pendidikan sejumlah 500 paket. Diantaranya berupa seragam sekolah SD, SMP dan SMA. Yakni untuk Ponpes Al Munawaroh sebanyak 180 paket, Ponpes Nur Al Ikhlas sebanyak 140 paket dan Ponpes Al Huro sebanyak 180 paket. Untuk baksos bedah rumah diberikan kepada David Irawan, yang merupakan warga Desa Loa Janan Ulu. (adv)

Penulis : Muhammad Raffi

Anggota DPRD Kukar Ketersediaan Listrik di Kecamatan Loa Janan

TENGGARONG - Kebutuhan dasar listrik 24 jam, rupanya masih menjadi tugas yang belum terselesaikan di Kutai Kartanegara (Kukar). Seperti halnya yang terjadi di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kukar. Dimana warga disana mengeluhkan daya listrik yang dialirkan tidak stabil. Meski sudah berulang kali menyampaikannya kepada PLN.

Anggota DPRD Kukar, Ahmad Yani, pun angkat bicara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (23/10/2023) lalu, ia meminta PLN yang memang memiliki wewenang menyediakan listrik 24 jam kepada masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini.

Ia pun berharap tidak hanya membebaskan hal ini kepada pemerintah saja. Baik PLN maupun dunia usaha yang berinvestasi di Kukar pun, khususnya di Desa Batuah bisa ikut ambil bagian dalam hal penyelesaian permasalahannya.



Anggota DPRD Kukar, Ahmad Yani

“Sudah ada dananya, masa tidak bisa selesai. Tidak ada anggaran harusnya menjadi tugasnya PLN, sehingga tidak ada alasan tidak selesai,” kata Ahmad Yani.

Hal ini pun turut jadi perhatian Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid. Persoalan ini sudah terjadi lama, yakni di RT 48 dan 49 di Dusun

Tani Jaya. Karena hingga saat ini sama sekali belum terpasang jaringan listrik, padahal anggarannya sudah ada. “Waktu tidak ada anggaran, PLN mengatakan susah membangun, tapi setelah anggarannya disiapkan Pemkab Kukar melalui BKKD, malah PLN mengatakan tidak bisa mengerjakan,” imbuhnya.

Diketahui, ada jaringan sepanjang 6 kilometer (km) yang diusulkan untuk dialiri jaringan listrik. Pemdes Batuah pun diketahui sudah menyiapkan anggaran melalui anggaran Bantuan Khusus Keuangan Daerah (BKKD).

“Kalau anggarannya ada, seharusnya PLN tinggal menunjuk kontraktor yang menjadi rekanan PLN. Kalau ini dilempar ke kontraktor, pasti tidak ada yang mau. Kalau sudah situasi begini, harusnya PLN bertanggung jawab,” tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i





SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel








Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

Drusen Toyota lebih mudah!



Bontang



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi

Kenali Lebih Dekat Dokter Spesialis Anak dan Kondisi yang Ditangani

BONTANG - Kebutuhan medis antara anak-anak dengan orang dewasa sangat berbeda. Itulah sebabnya dibutuhkan seorang dokter spesialis anak untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang anak sedang alami.

Dokter Spesialis Anak adalah dokter yang berfokus pada perawatan kesehatan fisik, mental, serta perkembangan sosial anak. Dokter Spesialis Anak, Dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A, di RSUD Taman Husada Bontang menjelaskan untuk dokter spesialis anak menangani mulai usia 0-18 tahun.

“Dokter anak menangani mulai dari usia 0 sampai dengan usia 18 tahun. Jika sudah 18 ke atas sudah diharuskan untuk ke dokter penyakit dalam,” paparnya, Selasa (24/10/2023).

Dokter Spesialis Anak menangani operasi yang tidak ada tindakan, seperti jika ada yang melahirkan dengan cara caesar, maka tugas Dokter Spesialis Anak menerima bayi tersebut.

“Kalau pun ada yang caesar, kami yang bertugas menerima bayinya. Jadi kita yang menolong bayinya, bayi yang memerlukan pertolongan di awal kehidupannya, pasti yang pal-

ing utama adalah dengan memanggil kami,” ucapnya.

Selain itu, dr Putri juga menambahkan untuk Dokter Spesialis Anak paling sering menangani gejala batuk pilek, paling umumnya. Karena penyakit anak itu ada banyak sekali, tidak hanya sekedar batuk pilek saja, akan tetapi ada juga seperti paru, jantung anak, pencernaan, kegawatan, masuk Intensive Care Unit (ICU) anak yang disebut Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Penulis: Dwi S

Editor: Nicha Ratnasari

Waspada Flu Singapura pada Anak, Begini Gejala dan Cara Pengobatannya

BONTANG - Flu Singapura pada anak merupakan gejala ringan yang akan sembuh dengan sendirinya. Penyakit ini lebih sering menyerang pada anak-anak maupun balita. Namun, orang dewasa pun juga bisa terkena penyakit ini, meski sangat jarang terjadi.

Dokter Spesialis Anak, Dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A, di RSUD Taman Husada Bontang menyatakan jika anak-anak lebih rentan terkena Flu Singapura. Hal ini karena daya tahan tubuh anak yang belum sekuat orang dewasa.

“Gejalanya Flu Singapura ini pun terdiri dari demam. Biasa maksimal demam sampai tiga hari. Setelah itu. Diikuti dengan tumbuhnya ruam, dan juga gatal-gatal yang mirip dengan cacar air”, ucapnya saat diwawancarai awak media radarbontang.com, Selasa (24/10/2023), kemarin.

Biasanya, saat anak mengalami Flu Singapura ini terjadi di area sekitar mulut, tangan, kaki, pantat, telapak tangan, telapak kaki, sikut, dan lutut. Bahkan, muncul juga di area kemaluan.

“Khasnya Flu Singapura ini adalah dengan adanya luka yang hampir mirip dengan sariawan dirongga mulut. Bisa di tenggorokan dalam, lidah, bibir, bahkan pipi dalam,” paparnya.

Untuk pengobatan yang diperlukan saat anak mengalami Flu Singapura



ini contohnya seperti demam, yang akan diberi obat penurun panas. Jika sariawan akan diberi olesan atau disemprotkan untuk membuat sariawan berkurang.

“Karena biasanya anak kecil kendala tidak mau makan saat mengalami sariawan, untuk gejala ruam bisa diberi saleb khusus yang dioleskan pada kaki, tangan, lutut, atau sikut yang terkena bintik merah dan terdapat berisi air”, paparnya.

Saat mengalami Flu Singapura ini, dalam masa penyembuhan selama 10 hari lamanya jika bintik merah dibiarkan saja, tanpa dibuka atau

mengelupas. Jika luka dibuka atau mengelupas bisa membuat luka membekas.

“Untuk orang tua biasanya khawatir pada anak yang tidak mau makan, tidak kebayang gimana jadinya jika banyak sariawan di dalam rongga mulut anak. Untuk anak di bawah dua tahun, dan yang makannya masih banyak drama lebih baik dikasih makan yang lembut dan dingin, yang nyaman untuk ditelan”, tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Ruang anggrek RSUD Taman Husada Bontang bagi pasien isolasi.

Ruang Anggrek RSUD Taman Husada Bontang Khusus Pasien Isolasi, Masyarakat Wajib Tertib Aturan

BONTANG – Ruang Anggrek yang ada di RSUD Taman Husada Kota Bontang di khususkan bagi pasien isolasi seperti perawatan kasus airborne disease. Yakni, meliputi penyakit TB, TB MDR, Covid-19, SARS, MERS dan Pneumonia MRSA.

Kepala Ruang Anggrek RSUD Bontang, Ria Kusuma Dewi mengatakan bahwa Ruang Anggrek dikhususkan bagi pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit yang dapat menular melalui udara dan pasien yang terbanyak seperti TB (Tuberculosis).

Ria menambahkan bahwa Ruang Anggrek sendiri memiliki kapasitas sebanyak 16 tempat tidur. Terdiri dari ruang isolasi ICU bertekanan negatif sebanyak 4 tempat tidur dan ruang isolasi non ICU bertekanan negatif sebanyak 12 tempat tidur.

“Fasilitas di Ruang Anggrek pada

setiap kamar terdapat 1 bed electric, dilengkapi dengan bed monitor, televisi, meja, kursi dan kamar mandi pasien. Selain di ruang ICU, ruang lainnya juga dilengkapi dengan dukungan alat – alat canggih seperti ventilator, HFNC, mesin suctioning, defibrillator, alkes emergency dan drug emergency yang selalu siap digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga didukung oleh tenaga ahli profesional di bidangnya,” kata Ria Kusuma Dewi.

Selanjutnya, Ia mengatakan pasien pada Ruang Anggrek seharusnya tidak diperkenankan untuk dijenguk untuk mengurangi tingkat penyebaran penyakit yang dapat ditularkan melalui udara dari percikan dahak pasien.

“Jadi untuk pasien TBC dengan perawatan isolasi di Ruang Anggrek pasien tidak diperkenankan untuk di-

jenguk. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih banyak pengunjung atau masyarakat yang belum mengetahui. Untuk itu diharapkan mulai dari sekarang informasi edukasi tentang tata tertib Ruang Anggrek dapat dipatuhi masyarakat,” harapnya.

Ria menambahkan dengan mematuhi aturan di Ruang Anggrek RSUD Taman Husada Kota Bontang dapat mewujudkan tujuan yakni aman pasien, aman keluarga, aman petugas.

“Sehingga apa yang menjadi tujuan kami aman pasien, aman keluarga dan aman petugas dari penyakit menular dapat terwujud,” tandasnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari

Lengkapi Alat Kesehatan, RSUD Taman Husada Dapat Kucuran Rp 46 Miliar



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Direktur RSUD Taman Husada, dr Suhardi, Sp.JP saat menjelaskan pemenuhan alat kesehatan

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang mendapatkan anggaran sebesar Rp 46 miliar untuk pembelian alat kesehatan hingga untuk kebutuhan pengembangan SDM rumah sakit.

Direktur RSUD Taman Husada Kota Bontang, dr Suhardi, Sp.JP menjelaskan anggaran ini diperoleh dari anggaran APBD Perubahan tahun 2023 di mana anggaran akan diperuntukkan untuk pemenuhan alat-alat kesehatan di RSUD Bontang dan pengembangan SDM.

“Untuk saat ini RSUD mendapatkan anggaran yang sebagian besar untuk pengadaan alat kesehatan,” kata dr Suhardi, Sp.JP saat ditemui.

Lanjut dr Suhardi, alat kesehatan yang telah direncanakan pengadaannya seperti alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk RSUD Bontang.

“Beberapa memang rencana kami untuk pemenuhan alat kesehatan. Termasuk yang besar pengadaan alat MRI. Ini hanya beberapa rumah sakit yang punya di Kaltim, RSUD Bontang termasuk yang akan punya,” jelasnya.

Selain itu, Ia mengatakan anggaran juga digunakan dalam penunjang alat kesehatan lainnya dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, untuk kebutuhan SDM tenaga kedokteran spesialis telah memenuhi beberapa SDM.

“Kami sudah mulai banyak tenaga spesialis. Ke depan akan semakin komplit. Karena kami harap RSUD Bontang akan menjadi pelayanan masyarakat dan menjadi rujukan bagi daerah di luar Kota Bontang. Karena akan semakin lengkapnya SDM dokter dan sarana dan prasarana,” ungkapnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari

LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal

Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG

Scan QR CODE Test Drive

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

3 Binger Kencana No. 226A, Sebelah Dc, Bontang Barat
Kota Bontang Kalimantan Timur

Padu Aplikasi M-TOYOTA

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!



Persiapan Kunker Presiden Jokowi di Kubar, Kapolda Kaltim Tinjau Sejumlah Titik

KUTAI BARAT - Kedatangan Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto ke Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengecekan ke sejumlah titik lokasi yang nantinya akan dikunjungi Presiden RI Joko Widodo pada HUT ke-24 Kabupaten Kutai Barat, 3 November 2023 mendatang.

Setibanya di Bandar Udara Melalan, rombongan Kapolda Kaltim disambut oleh Bupati Kutai Barat FX Yapan beserta Forkopimda, dan tokoh masyarakat.

Setelah melakukan perbincangan antara Kapolda Kaltim dengan bupati Kutai Barat FX Yapan, rombongan Kapolda Kaltim melanjutkan peninjauan.

Kapolres Kutai Barat, AKBP Heri Rusyaman menjelaskan, kunjungan Kapolda Kaltim ke Kutai Barat pada hari ini dalam rangka peninjauan kesiapan di sejumlah titik lokasi yang mungkin nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo.

Kapolres menyebutkan, adapun titik sasaran yang ditinjau oleh Kapolda antara lain, Masjid Islamic Center Melak, Jembatan ATJ Melak, Taman Budaya Sendawar (TBS), dan Alun-Alun Itho.

"Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan kita menyambut bapak Presiden RI ke Kabupaten Kutai Barat untuk pertama kalinya," tandasnya.

Selain meninjau ke beberapa lokasi, Kapolda Kaltim juga melakukan kunjungan kerja ke Polres Kutai Barat.

Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja perdana bagi Kapolda setelah menjabat sebagai Kapolda Kaltim dan sempat memberikan arahan kepada personel Polres Kutai Barat.

Penulis : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari





MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM